

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) GUDANG LELANG KOTA BANDAR LAMPUNG (STUDI PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN KUD MINA JAYA)

**Oleh:
RASHIEKA AULIA LANDEYUWI**

Kebijakan retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Gudang Lelang merupakan salah satu instrumen pemerintah daerah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pemungutan atas jasa usaha yang disediakan, yaitu layanan pelelangan hasil tangkapan nelayan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui pengelolaan TPI Gudang Lelang oleh Dinas Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan KUD Mina Jaya. Namun realisasi penerimaan retribusi TPI Gudang Lelang dalam tiga tahun terakhir belum mencapai target. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan retribusi TPI Gudang Lelang serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edwards III (1980) yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Model Interaktif dari Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi TPI Gudang Lelang belum optimal karena belum ada sosialisasi resmi terkait kebijakan retribusi TPI Gudang Lelang, kurangnya keterlibatan tenaga pengawas dan tidak tersedianya anggaran untuk pemeliharaan infrastruktur TPI, pengawasan belum rutin dilakukan dan komitmen pelaksana masih rendah, serta SOP belum dijalankan secara optimal dan fragmentasi organisasi yang belum terdefinisi dengan jelas.

Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan; Retribusi; Tempat Pelelangan Ikan.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF FISH AUCTION RETRIBUTION POLICY AT THE FISH AUCTION PLACE (TPI) GUDANG LELANG KOTA BANDAR LAMPUNG (STUDY AT THE DEPARTMENT OF MARINE AND FISHERIES AND KUD MINA JAYA)

By:
RASHIEKA AULIA LANDEYUWI

The retribution policy for the Fish Auction Place Gudang Lelang serves as one of the local government's instruments in Bandar Lampung City to increase local revenue through charges on business services, specifically auction services for fishermen's catch. This policy is implemented by the Department of Marine Affairs and Fisheries in collaboration with KUD Mina Jaya. However, in the past three years, revenue realization has consistently fallen short of targets. This study aims to analyze the policy's implementation and identify supporting and inhibiting factors using Edward III's (1980) implementation framework, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This research employs a descriptive qualitative method. The data analysis technique used in this study is the Interactive Model of Miles & Huberman. The findings indicate that the implementation of the retribution policy at Fish Auction Place Gudang Lelang has not been optimal due to the absence of formal socialization regarding the retribution policy, a lack of supervisory personnel, the absence of a dedicated budget for infrastructure maintenance, irregular monitoring, low commitment from implementers, suboptimal application of Standard Operating Procedures (SOPs), and an organizational structure that remains poorly defined.

Keywords: *Implementation; Policy; Retribution; Fish Auction Place.*